

# ABSURD? TANTANGAN ALBERT CAMUS

# BAST

menembus fakta

SYAMSUL ARIFIN

**P**erang, Pesan  
Perdamaian Agama &  
Kepemimpinan yang  
Rendah Hati

A. SUDIARJA

**B**ecermin dari Demokrasi  
untuk India: Sumbangan  
Pemikiran Mahatma Gandhi

HERU PRAKOSA

**R**eformasi  
Cara Pikir ala  
Edgar Morin  
dan Sepak Bola

**SINDHUNATA**  
Immanuel Kant  
& Aufklärung:  
Bangunlah  
dari Kemalasan  
Akalmu

DUA BULANAN, NOMOR 05 - 06, TAHUN KE-75, 2026

Rp35.000,00

IMMANUEL KANT, 2026  
karya BUDI UBRUX

*Subsidi*  
2026

JURNALISME SERIBU MATA

# BASIS

menembus fakta

SIUPP No. 213/SK/MENPEN/SIUPP/D.1/1986

Jo Ditjen PPG

Nomor 32/Ditjen/PPG/K/1996, 27 Maret 1996

Penerbit

**Yayasan BP Basis**

Anggota SPS ISSN: 0005-6138

Penasihat

**Franz Magnis-Suseno**

Pemimpin Umum

**Sindhunata**

Pemimpin Redaksi

**A. Setyo Wibowo**

Wakil Pemimpin Redaksi

**A. Sudiarta**

Dewan Redaksi

**B. Hari Juliawan**

**Heru Prakosa**

**A. Bagus Laksana**

**Klaus Heinrich Raditio**

Redaktur Pelaksana

**C. Bayu Risanto**

Redaktur

**Setyaningsih**

**Dian Vita Ellyati**

**Francisca Purnawijayanti**

Redaktur Artistik

**Hari Budiono**

Sekretaris Redaksi

**Anang Pramuriyanto**

Promosi/ Iklan

**Slamet Riyadi, A. Yulianto**

**Willy Putranta**

Administrasi/ Distribusi

**Francisca Triharyani**

Kuangan

**Widarti**

Alamat

Jl Pringgokusuman No. 35, Yogyakarta

Telepon: 081225225423, Faks: (0274) 546811

Surel administrasi/distribusi:

basis.adisi@gmail.com

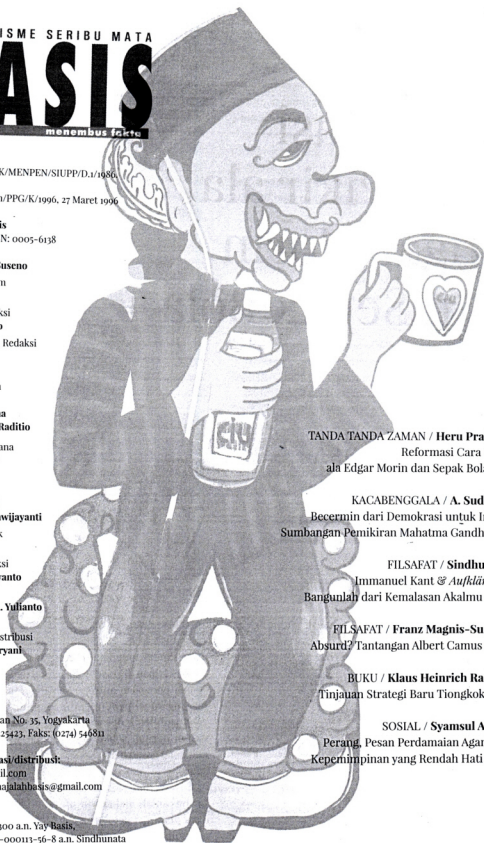
Surel redaksi: majalahbasis@gmail.com

Rekening:

BCA No. 1263333300 a.n. Yay Basis,

BRI No. 0029-01-000113-56-8 a.n. Sindhunata

BNI No. 1952000512 a.n. Bpk Sindhunata



**TANDA TANDA ZAMAN / Heru Prakosa**  
Reformasi Cara Pikir  
ala Edgar Morin dan Sepak Bola ... 2

**KACABENGGALA / A. Sudiarta**  
Becermin dari Demokrasi untuk India:  
Sumbangan Pemikiran Mahatma Gandhi ... 6

**FILSAFAT / Sindhunata**  
Immanuel Kant & *Aufklärung*:  
Bangunlah dari Kemalasan Akalmu ... 24

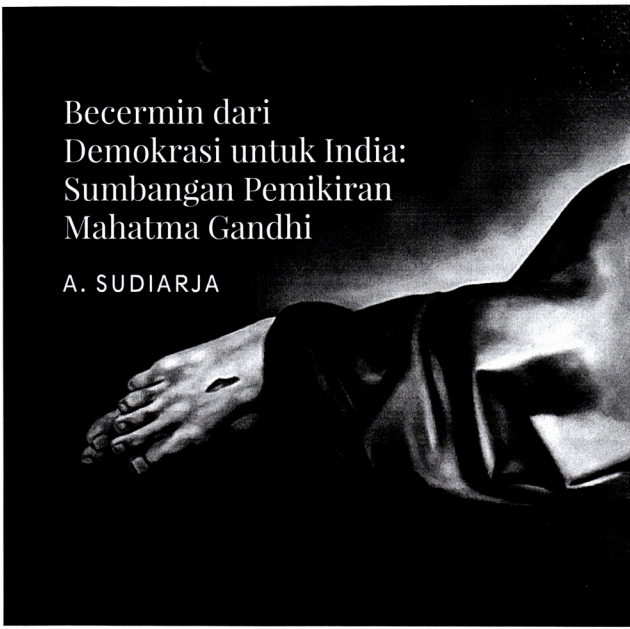
**FILSAFAT / Franz Magnis-Suseno**  
Absurd? Tantangan Albert Camus ... 50

**BUKU / Klaus Heinrich Raditio**  
Tinjauan Strategi Baru Tiongkok ... 57

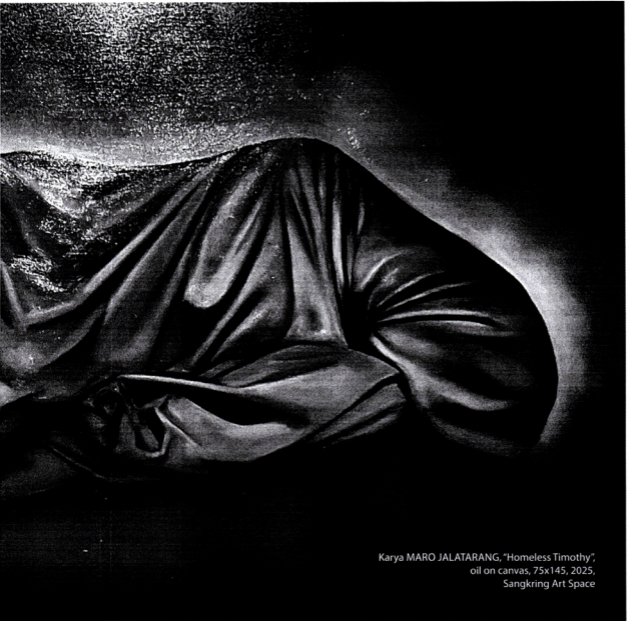
**SOSIAL / Syamsul Arifin**  
Perang, Pesan Perdamaian Agama &  
Kepemimpinan yang Rendah Hati ... 62

# Becermin dari Demokrasi untuk India: Sumbangan Pemikiran Mahatma Gandhi

A. SUDIARJA



Sumbangan pemikiran Mahatma Gandhi untuk demokrasi India menjelang kemerdekaannya bisa menjadi bahan perbandingan merefleksikan awal demokrasi kita. Sebagaimana Indonesia, India, meski mayoritas penduduknya beragama Hindu, tapi di sana plüralitas agama juga berkembang. Selain itu, kedua negara ini sama-



Karya MARO JALATARANG, "Homeless Timothy",  
oil on canvas, 75x145, 2025,  
Sangkring Art Space

sama mengalami penjajahan oleh bangsa Eropa untuk waktu yang lama setelah dikuasai oleh Kongsi Dagang dari Pemerintah Penjajah. Bagaimana demokrasi yang muncul dari wacana Eropa untuk tata negara modern itu mendapatkan respons dari pemikiran tokoh besar seperti Mahatma Gandhi ini?

Seperi Indonesia, atau Hindia Belanda waktu itu, sesudah VOC (*Vereenigde Oost-indische Compagnie*) pada tahun 1799 menyerahkan kekuasaan jajahannya kepada pemerintah Belanda, India mengalami hal yang sama dengan penyerahan kekuasaan jajahan dari Kongsi Dagang Hindia Timur (*The East India Company*) kepada kekuasaan Kerajaan Inggris pada tahun 1857 (Yust, 1955). Maka sejak saat itu, India resmi diperintah oleh seorang gubernur jenderal yang diangkat oleh dan sekaligus mewakili Takhta Kerajaan Inggris serta diberi gelar Raja Muda (*Viceroy*). Mahatma Gandhi lahir dua belas tahun kemudian, pada tanggal 2 Oktober 1869 di Porbandar, wilayah kekuasaan Kathiawar Kerajaan India (jajahan Inggris).

Gandhi kemudian dikenal sebagai salah seorang pemimpin gerakan kemerdekaan India yang menganjurkan "perlawanan tanpa kekerasan" (*non-violence civil disobedience*). Dalam sebuah wawancara dengan Webb Miller, Gandhi mengatakan bahwa ia belajar dari David Thoreau,

*"I read Walden first in Johannesburg in South Africa in 1906 and his ideas influenced me greatly. I adopted some of them and recommended the study of Thoreau to all my friends who were helping me in the cause of Indian independence - Pertama kali saya membaca Walden di Johannesburg, Afrika Selatan tahun 1906, pemikirannya sangat mempengaruhi saya. Beberapa pemikirannya saya adopsi dan saya rekomendasikan kepada teman-teman yang membantu saya dalam perjuangan kemerdekaan India" (Sharma, 2001).*

Karier politiknya mulai dirintis pada usia 37 tahun sesudah bekerja selama 13 tahun sebagai pengacara di Afrika Selatan yang juga dijajah oleh Inggris.

Di Afrika Selatan, bersama orang-orang besarnya, ia mengalami perlakuan diskriminasi. Hal inilah yang menggerakannya mengubah cita-cita hidupnya, yang semula untuk menjadi pengacara yang sukses, ke politik kemerdekaan. Perubahan orientasi politik ini diawali dengan keberhasilannya mengumpulkan tiga ribu orang India untuk mengucapkan ikrar bersama di Johannesburg, 11 September 1906, yang ia sebut sebagai "perlawanan pasif" (*passive resistance*) melawan pemerintah. Pada tahun 1915 Gandhi berangkat ke India, meninggalkan Afrika Selatan untuk seterusnya, dan memindahkan kegiatan politiknya ke negaranya sendiri. Selama lebih dari tiga puluh tahun di India, Gandhi

mengembangkan pemikirannya disertai tindakan-tindakan politik yang konsekuen dengan pendiriannya.

### Latar belakang biografis-politis Gandhi

Demokrasi biasanya diartikan sebagai sistem pemerintahan yang ditentukan oleh rakyat, baik melalui pemilihan umum secara langsung maupun tidak langsung, lewat perwakilan yang diperebutkan partai-partai. Rumusan paling ringkas dan paling baik tentang demokrasi dari Abraham Lincoln, yakni *"The government of the people, by the people, for the people"* - Pemerintahan rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat" (dikutip oleh M.V. Naidu dalam *The Eight Fundamentals of Democracy: A Gandhian Analysis* (lih. Sharma, 2001). Dalam arti ini, rakyat meliputi semua warga negara, yang berhak memilih pemimpin maupun masing-masing atau setiap warga negara yang berhak dipilih sebagai pemimpin, tanpa pandang bulu. Itulah demokrasi yang sepenuhnya.

Sistem demokrasi ini biasanya dipertentangkan dengan sistem totaliter, baik itu totalitarianisme agamis ataupun ideologis, yakni ketika pemimpin memang berasal dari rakyat, tetapi cara pemilihan tidak dilakukan oleh (semua) rakyat, atau sebaliknya, semua rakyat (bisa) memilih, tetapi calon dibatasi dengan kriteria yang mendiskriminasi golongan rakyat tertentu. Dengan demikian, demokrasi mengandaikan persamaan hak bagi seluruh rakyat sebagai warga negara.

Namun, lebih dari sekadar sebuah sistem atau metode birokrasi, perhatian Gandhi tertuju pada rakyat sebagai subjek politik, pada pengetahuan dan kesadaran mereka, pada mental dan semangat mereka dalam bernegara, karena menurutnya inilah yang lebih penting dan mendasari sistem pemerintahan demokrasi yang ternyata bisa bermacam-ragam meski semua menggunakan istilah "demokrasi". Dalam demokrasi, di satu pihak rakyat perlu belajar mandiri dan setia pada kebenaran, di lain pihak pemimpin dan proses hukum harus mencerminkan kehendak rakyat. Maka, jikalau proses hukum (*rule of law*) tidak berjalan atau berjalan tetapi tidak adil, menurut Gandhi, warga negara bebas untuk melawannya dengan melakukan pembangkangan. Untuk lebih memahami karakter demokrasi yang dikemukakan Gandhi, kiranya perlu sekadar mengenal latar belakang hidup Gandhi, terutama hal-hal yang berpengaruh dalam pembentukan pemikirannya tersebut (Lih. "Satyagraha", dalam Sudiarja, 2018).

Klostermaier pada akhir buku pengantar *Hinduism* memilah para tokoh nasionalis India menjelang kemer-

dekaan dalam dua bagian. Kelompok pertama, yang bisa menerima ide-ide Barat, dan kelompok kedua yang menolak ide-ide Barat. Klostermaier memasukkan Gandhi dalam kelompok yang bisa menerima ide-ide Barat, artinya, bagi Gandhi, Hinduisme tidak perlu dipertentangkan secara antagonis dengan budaya Barat. Selain Gandhi, ada juga Ram Mohan Ray (1772-1833) dan Gerakan Brahma Samaj, Ramakrishna (1834-86), dan Vivekananda (1863-1903) (Klostermaier, 2007). Menjelang kemerdekaan, seperti halnya Indonesia dahulu, pandangan kaum intelektual dan nasionalis India terpecah. Mereka memperbincangkan bagaimana mesti bersikap terhadap penjajah negara, yakni pemerintah Inggris. Berbagai macam sikap dan disposisi politik dimungkinkan, terbentang menjadi dua ekstrem: yang terang-terangan menolak sama sekali kebudayaan Barat, semata-mata karena mereka adalah penjajah, dan yang masih bisa menerima ide-ide Barat, yang dianggap maju, modern, dan menguntungkan, tetapi tanpa kehilangan kehinduan mereka. Dalam hal ini tampak disposisi Gandhi yang terbuka terhadap pengaruh Barat, tetapi secara selektif memilih dan menggunakan yang baik untuk mentransformasikan kebudayaan dan tradisi Hindunya. Dengan demikian, dia dapat disebut sebagai seorang pejuang reformis.

Memang, bagi kaum intelektual modern, lebih-lebih yang sudah mengikuti pendidikan Barat, sulit menolak gagasan modernitas seperti demokrasi, ekonomi pasar, teknologi, dan lainnya. Bagi negara baru yang akan didirikan, hal-hal tersebut menjadi prasyarat untuk tata kelola pemerintahan modern, yang berbeda dari tradisi monarki. Demokrasi, misalnya, akan mengangkat kepentingan rakyat, bukan raja atau bangsawan, untuk menentukan siapa yang harusnya memerintah. Di Eropa pun dalam perkembangan awalnya, paham demokrasi mempunyai berbagai versi untuk mencari moderasi dan kesesuaian dengan keyakinan dasar mereka, seperti demokrasi liberal, demokrasi sosial, demokrasi Kristen, dan sebagainya. Karena India adalah negara besar dengan mayoritas penduduk beragama Hindu, maka penolakan ide Barat atas dasar pandangan Hindu cukup kuat juga.

Sementara itu, Gandhi dan beberapa intelektual India, yang pernah merasakan pendidikan Barat, juga menyadari bahwa demokrasi India pun bisa diarahkan ke berbagai macam sistem tata kelola. Mereka mengusahakan agar pandangan Hindu dapat mengakomodasi gagasan demokrasi Barat sehingga terbentuk

sistem pemerintahan demokrasi yang khas India, meski ideal ini tidak mudah dicarikan kesepakatan.

Mahatma Gandhi lahirkan pada 2 Oktober 1869 dari keluarga yang kuat tradisi Hindunya. Keluarganya pemeluk Vaishnava. Ibunya seorang yang saleh, berkunjung ke kuil dan berpuasa secara teratur. Ayahnya meninggal ketika Gandhi masih remaja. Meskipun masih remaja, Gandhi sudah jadi bapak keluarga karena pada usia 13 tahun sudah dikawinkan mengikuti kebiasaan Hindu pada waktu itu. Peristiwa meninggalnya ayahnya menjadi kenangan pedih. Ketika ayahnya meninggal dunia, ia bukannya menunggui dan memijat kakinya seperti biasa, tapi malah menutup diri di kamar bersama istrinya (Gandhi, 1972). "Malam itu ayah menilapanku," katanya menyisahkan peristiwa itu (Sudiarja, 2018).

Pada awal hidupnya, Gandhi tumbuh seperti anak lainnya, tanpa keistimewaan. Pelan-pelan berkembanglah orientasi hidupnya. Ketika harus menentukan cita-cita, mula-mula ia ingin menjadi dokter, namun karena pertimbangan kerabat-kerabatnya bahwa seorang pengikut Vaishnava tidak boleh berurusan dengan badan manusia, apalagi dengan memotong-motong tubuh (Gandhi, 1972). Gandhi beralih ke studi hukum dan memberanikan diri ke Inggris (Klostermaier, 2007). Waktu itu kepergian ke luar negeri, apalagi sampai harus tinggal lama di sana, sudah diasosiasikan dengan kehilangan kastanya. Maka Gandhi pun perlu menyatakan sumpah kepada ibunya untuk tidak minum anggur, tidak makan daging, dan tidak menyentuh wanita. Baru sesudah itu ibunya melepas Gandhi (Gandhi, 1972).

Selesai studi, Gandhi bekerja beberapa saat tinggal di India. Pada 1893, ia tertarik pada sebuah perusahaan di Afrika Selatan, milik pengusaha muslim, Dada Abdulla Sheth yang menawarinya (Sudiarja, 2018). Dari Afrika Selatan inilah perjuangan kemanusiaannya semakin kentara, dan namanya semakin dikenal. Dalam berkarier sebagai pengacara, tak jarang dia harus melawan kekuatan-kekuatan politik di negara itu. Ia menyaksikan praktik diskriminasi yang luas karena dijalankan secara sistemik. Kesadaran dan perjuangannya semakin gigih ketika ia sendiri mengalami diskriminasi.

Dalam perjalanan kereta api dari Durban ke Pretoria, seorang kulit putih masuk ke kompartemen kelas satu di mana dia duduk. Ketika melihatnya, orang itu menyuruhnya keluar, tetapi Gandhi bertahan karena dia mempunyai tiket kelas satu. Konduktur menawarinya untuk pindah ke kelas dua, tetapi Gandhi tidak mau

kompromi. Maka ia dikeluarkan dari kereta api itu dengan kopor bawanya (Gandhi, 1972). Peristiwa ini begitu mendalam dan menginspirasinya dengan ide "nonkekerasan" (*Ahimsā*), yang kemudian dikembangkan dalam praksis politiknya. Namun dalam praksis politik, tak dapat dihindari bahwa ia harus bekerja sama dengan banyak orang muslim sebangsanya. Hal ini mengugah kesadarannya bahwa kesetiaan pada agama Hindunya harus terbuka pada paham maupun agama lain. Selain itu, ia juga mengenal beberapa pemuka Kristen, antara lain C.F. Andrews, seorang pastor Anglikan yang menjadi sahabat dan pendukungnya. Kelak orang ini menemani Gandhi ketika pulang kembali ke India. Ketika pemerintah Afrika Selatan meminta semua warga kulit berwarna mendaftarkan diri dan memberikan cap jempolnya, Gandhi melawan karena program itu bersifat diskriminatif. Ia memunculkan istilah *Satyāgraha*, setia pada kebenaran, yang memberi dasar kuat untuk bersikap pantang menyerah dalam perlawanan (Klostermaier, 2007).

Dari pengalaman perjuangannya di Afrika Selatan ini, Gandhi mengembangkan pemikiran yang khas untuk dibawa ke India, mengawali masa-masa persiapan kemerdekaan. Ia bertolak ke India, untuk seterusnya, pada tahun 1915. Mula-mula ia mendirikan asrama di Wardha, dekat Ahmedabad untuk mendidik para aktivis gerakan kemerdekaan. Aturan yang dia pakai berasal dari *yama-niyama*, ajaran kuno dari tradisi *Bhagavadgītā*. Dua prinsip yang ia ajarkan pada murid-muridnya di asrama yang ia dirikan adalah *satya* dan *ahimsā*, kebenaran dan nonkekerasan. Prinsip ini nantinya diadopsi oleh demokrasi India sebagai pilar negara dalam motonya: *satyam eva jayate*, hanya kebenaran yang menang.

Gandhi menyebut diri sebagai pencari kebenaran; autobiografinya yang terbit tahun 1924 diberinya judul *My Experiments with Truth* (Klostermaier, 2007). Autobiografi ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, *Gandhi sebuah Otobiografi*, oleh Penerbit Sinar Harapan pada 1978). Prinsip yang dipegang Gandhi adalah pengosongan diri di hadapan Tuhan (*self effacement*), ia sering berpuasa dan menyendiri untuk mencari kebenaran. Prinsip yang kedua, nonkekerasan (*non-violence*) bukan hanya berarti tidak membunuh, melainkan kepedulian aktif mencintai semua makhluk hidup. Kedua prinsip inilah yang juga dikembangkan dalam politik.

Dalam hal ini, Gandhi berani berseberangan dengan rekan-rekannya yang ingin melawan pemerintah Inggris melalui jalan revolusi, seperti Bal Gangadhar Tilak, Subhas Chandra Bose, Vir Savarkar, dan lainnya (Klostermaier, 2007). Jikalau pembicaraan dengan pemerintah Inggris tidak menemukan titik temu, Gandhi lebih suka menggunakan senjata kebenaran yakni: nonkooperasi dalam bentuk pembangkangan sipil (*civil disobedience*), yakni tidak menjalankan perintah ataupun peraturan yang ditetapkan dengan segala risikonya. Pernah terjadi peristiwa gerakan tanpa-kekerasan yang ia anjurkan berubah menjadi beringas dan orang-orang menggunakan kekerasan; Gandhi menyesal dan bertanya-tanya apakah mereka cukup masak dan berani untuk menanggung risiko dari prinsip *ahimsā* itu. Ia melakukan puasa untuk memberi silih terhadap peristiwa itu, ia mengatakan bahwa tindak *ahimsā* harus disertai keberanian berkorban. Ia memberi contoh, bagaimana ia berjalan di tengah kekacauan massa, menghadapi serdadu Inggris sendirian tanpa senjata, ketika ia tidak mau membatalkan rencana doa bersama.

Akhirnya, Gandhi memang meninggal karena ditembak, tetapi bukan oleh tentara Inggris, melainkan Nathuram Godse, seorang Hindu fanatik yang tidak mau diyakinkan untuk melakukan *ahimsā* (idem).

### Inspirasi dari Bhagavadgītā

Banyak tokoh nasionalis India menjelang kemerdekaan yang digerakkan oleh semangat Hindu, terutama juga oleh inspirasi dari kitab suci mereka. Pengaruh Barat, terutama Inggris yang menjajah mereka, di satu pihak memberi dorongan untuk kemajuan modern, tetapi dari lain pihak juga menantang dan menginspirasi reformasi, baik di bidang keagamaan maupun keadaban lokal. Di antara kelompok nasionalis Hindu, terdapat gerakan *Hindutva*, yang mempunyai pendirian keras melawan penjajah.

*Hindutva*, arti harfiahnya kehinduan, menjadi istilah yang populer di kalangan nasionalisme Hindu sebagai gerakan untuk pembentukan negara India dengan identitas Hindu yang kuat, menyangkut aspek keagamaan, budaya, dan politik. Mengingat Hindu merupakan agama mayoritas di India, maka, dalam bentuknya yang ekstrem, *Hindutva* bahkan menolak Kristen dan Islam di tanah India. Beberapa kali terjadi juga kekerasan terhadap budaya dan agama minoritas, termasuk kekerasan seksual terhadap kaum perempuan kelompok minoritas dan kelompok Hindu sendiri yang tidak menaati perintahnya. *Hindutva* juga membawahi

kaum pribumi (*adivasis*), *dalits* (kasta terendah, kurang beruntung dalam ekonomi), dan yang miskin. (Jones & Ryan, 2007).

Dalam hal pendirian, Gandhi juga seorang yang keras. Ia mengajarkan bahwa kebenaran harus dipegang, kalau perlu dengan pengorbanan. Ia pernah menyebutkan tujuh dosa sosial; politik tanpa prinsip, kekayaan tanpa kerja, kesenangan tanpa kesadaran, pengetahuan tanpa karakter, perdagangan tanpa moral, ilmu tanpa kemanusiaan, dan agama tanpa pengorbanan (Fernandes, 1988). Ucapan Gandhi ini sangat terkenal dan diakui oleh penulis bisa menjadi inspirasi juga bagi orang Kristen.

Dalam kerangka usahanya mewujudkan demokrasi di India, jelas sekali bahwa Gandhi menganut "politik yang berprinsip" dan "agama yang mengenal pengorbanan" sebagaimana tampak dalam ajarannya. Dalam hal prinsip yang harus dipegang, Gandhi keras pendiriannya dan tidak kenal kompromi. Namun, prinsip yang dipegangnya berdasar pada "agama yang mengenal pengorbanan". Hal ini kentara sekali dalam pernyataan-pernyataannya. Dan Bhagavadgītā merupakan kitab suci yang memberinya inspirasi mengenai kebenaran agamanya ini.

Mungkin aneh bahwa Gandhi baru mengenal Bhagavadgītā ketika ia belajar di Eropa. Itu pun dalam terjemahan bahasa Inggris. Terjemahan yang dimaksud adalah *The Song Celestial* (1885) dari Sir Edwin Arnold. Gandhi juga tertarik kemudian dengan buku Arnold, *The Light of Asia* (1879) (Gandhi, 1972). Hal ini diakuinya dengan rendah hati tanpa mengurangi rasa hormat dan kesetiannya pada agama Hindu. Sejak saat itu, ia terpicat dengan Bhagavadgītā dan menganggapnya sebagai kitab suci *par excellence* untuk mencari kebenaran. Ia mulai memperdalam bahasa Sanskerta dan membaca Bhagavadgītā dengan tekun. Baginya, Bhagavadgītā ibarat kamus yang, seperti kamus bahasa umumnya, memberikan keterangan mengenai berbagai macam perilaku dalam kehidupan (Gandhi, 1972). Yang khas dari Gandhi ialah penafsiran isinya yang begitu terbuka, yang jarang kita dapatkan dari komentator lain. P.M. Thomas bahkan mempertentangkan secara diametris penafsirannya dengan penafsiran Shri Aurobindo yang mempunyai pandangan ortodoks (Lihat "Two Radical Interpretations form Two Extreme Ends: Gandhi and Aurobindo" dalam Thomas, 1987).

Keterbukaan Gandhi pada penafsiran Bhagavadgītā juga dipengaruhi oleh pergaulannya yang luas dengan agama-agama lain. Misalnya, ia mengenal Ma-

dame Blavatsky dan Mrs. Besant dan ikut diskusi dalam pertemuan kelompok teosofi; sesudah itu juga pengenalan dengan tokoh-tokoh Islam dan Kristen. Pergaulannya dengan mereka juga membuka kesadarannya akan tuduhan para misionaris bahwa Hinduisme kental dengan praktik takhayul (Gandhi, 1972).

Ia mempunyai keyakinan bahwa kitab suci pun harus dibaca dengan alam pikiran sekarang yang menggunakan rasio. Bagi Gandhi, kitab suci Hindu, termasuk Veda, bersifat fragmentaris dan harus dibaca dengan terbuka. Isi pesannya yang bersifat ilahiah itulah yang harus dicari kembali dari teks-teks yang tertulis. Gandhi sendiri menerjemahkan Gita dalam bahasa Gujarat, bahasa ibunya, dengan judul *Anasaktiyoga* dan komentarnya memberi kesaksian tentang cara pendekatannya yang terbuka ini. Misalnya, banyak tafsir Bhagavadgītā menggunakan kata kunci *yoga* untuk mengartikan isinya, sementara Gandhi memberi judul *anasaktiyoga* untuk tafsir Bhagavadgītā dalam terjemahannya. Ia mengartikan ajaran Bhagavadgītā sebagai ajaran untuk tidak melakukan kekerasan. "Dia yang ingin menjadi *anāsakta* (*selfless*) harus tidak melakukan tindak kekerasan untuk mencapai keadaan ini (Thomas, 1987).

Sebetulnya, setiap kitab suci dapat didekati pada zaman modern ini dari dua sudut pandang, entah itu "akademis" atau "kerohanian" (Sudiarja, 2012). Sudut pandang pertama merupakan studi-studi teks kuno dan ilmu tafsir (hermeneutika) yang, berdasarkan fakta sejarah maupun hasil-hasil riset arkeologis, bisa memberikan sumbangan pemahaman pemikiran yang terkandung dalam kitab suci berdasarkan konteks awal. Sedangkan sudut pandang kedua, boleh dikata merupakan penafsiran kitab suci untuk kepentingan hidup, terutama bagi penganut agama yang bersangkutan pada zaman sekarang. Dalam hal Bhagavadgītā, mudah dipahami kalau ahli-ahli Barat lebih banyak menyorotinya dari sudut akademis, sedang para penganut Hindu dari India lebih cenderung mendekatinya dari sudut kerohanian. Kiranya dua hal ini tidak perlu dipertentangkan jikalau pun hasilnya berbeda.

Atau, seperti Mahatma Gandhi sendiri, dalam pengakuannya, ingin mendekati Bhagavadgītā dengan menggunakan akal yang kritis sehingga penafsirannya yang bersifat kerohanian tetap dapat dipertemukan dengan penelitian-penelitian akademis dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Gandhi memang pengagum dan pecinta Bhagavadgītā dan seluruh

hidupnya, seperti dikatakannya dalam biografi yang ditulisnya, diinspirasi oleh Bhagavadgītā.

Bhagavadgītā, menurut Prof. R.C. Zaehner, merupakan kitab suci Hindu yang menyatukan. Sejar dengan kitab suci Veda yang menjadi kitab suci baku orang Hindu, yang disebut *śruti*, Bhagavadgītā, meskipun bukan termasuk Veda, dan ditulis baru belakangan, juga mendapat kehormatan sebagai *śruti* justru karena inspirasinya yang baru, yang mau menyatukan berbagai macam mazhab dan sekte yang berkembang. Di tengah kontroversi berbagai tafsir Bhagavadgītā, dua pandangan kuat yang dianut berasal dari Shankara dan Ramanuja. Keduanya adalah penganut Vedanta, akan tetapi sementara Shankara berpandangan bahwa Bhagavadgītā mengajarkan monisme, Ramanuja berpandangan bahwa Bhagavadgītā mengajarkan teisme (ibidem).

Sebagaimana tampak dari ungkapan-ungkapan, Gandhi lebih cenderung sebagai penganut teisme. Dalam banyak tulisannya, ia menyebut kata "Tuhan", yang ia lukiskan sebagai "... daya misterius tak terlukiskan meliputi segala sesuatu. Saya merasakannya meskipun tidak melihatnya. Daya yang tak terlihat inilah yang membuat diri dirasa dan, toh, menafikan pembuktian karena tidak seperti semua yang kupersepsikan lewat indra. Dia mengatasi akal. Tetapi, mustahil memikirkan eksistensi Tuhan sebagai eksistensi terbatas" (Bose, 1972).

Tentu saja kita tidak boleh menyamakan konsep teisme yang dianutnya secara simplistik dengan konsep monoteisme Barat yang bertolak dari tradisi Abrahamik. Gandhi, misalnya, memperkenalkan istilah *Harijan* (anak Tuhan) untuk menyebut kaum sudra. Meski tidak menolak pembagian kasta, sebagaimana ditentukan dalam *Catur ashrama*, namun ia menerima kaum sudra dalam *ashram*-nya di Ahmedabad dan mengajak pengikutnya untuk menghormati keberadaan mereka. Dengan demikian, toleransinya yang besar pada kasta rendah ini berdasar pada keyakinan teistik. Dan ketika dia dibunuh oleh seorang Hindu yang fanatik, ia pun berseru, "*He Rām!* (Wahai, Rama!)" (Klostermaier, 2007)

Mula-mula B.G. Tilak yang mempromosikan Bhagavadgītā sebagai pegangan untuk perjuangan kemerdekaan. Baginya, Bhagavadgītā merupakan "Mandat Bertindak" (*The Gospel of Action*) untuk memperjuangkan kemerdekaan India sebagai kewajiban religius orang Hindu. Mahatma Gandhi kemudian mengambil inspirasi ini untuk menafsirkan *karma marga* dalam Bhagavadgītā

secara baru dan lebih luas, yakni keterlibatan untuk tindakan yang baik bagi negara maupun kemanusiaan (Klostermaier, 2007). Dalam komentar terjemahannya dalam bahasa Gujarat, Gandhi merumuskan ajaran Bhagavadgītā sebagai realisasi diri, melalui tindakan moral yang baik. Setiap orang mempunyai tubuh dan terkena hukum tindakan yang hasilnya mengena pada dirinya sendiri. Untuk itu, Gandhi menekankan perlunya melakukan setiap tindakan dengan penyerahan diri, *renunsiasi*, artinya tanpa berpamrih untuk kepentingan diri. Hanya dengan demikian, ia dapat menjelmakan Tuhan di dunia. Setiap orang, sedikit banyak, menjelmakan Tuhan dalam perbuatan baiknya. Krishna dalam Bhagavadgītā merupakan penjelmaan Tuhan sepenuhnya karena ia merealisasikan diri secara sempurna (Strohmeier, 2009).

Pendekatan Gandhi dalam persoalan nasional, seperti dikatakan P.M. Thomas, memang mempunyai dasar religius, tetapi religiusitas yang dimaksudkannya bukanlah agama yang sempit. "Religius dalam pemahaman Gandhi mempunyai pengertian yang lebih luas dibandingkan dengan Tilak, Aurobindo, dan penulis India lainnya. Gandhi berhasil dalam mengolah simbolisme religius tradisional dengan pemikiran reformis. Hal ini juga menyangkut pemahamannya mengenai Bhagavadgītā. Ia mengusahakan simbol-simbol dalam persoalan aktual yang menghindari konfrontasi komunal (Thomas, 1987).

Tak dapat disangkal bahwa Bhagavadgītā mempunyai dampak yang kuat pada banyak pemikir nasional India menjelang kemerdekaan mereka, khususnya terhadap Gandhi. Gandhi terdidik secara religius sejak masa kecilnya dan, selain dari Hinduisme, ia juga mendapat pengaruh melalui pendidikan formal dalam cita-cita etis dari Islam, kristianitas, dan Jainisme, sedemikian sehingga cita-cita politiknya bernuansa moral religius yang kuat. Dalam hal ini, ia berlawanan dengan Jawaharlal Nehru (1889-1964), seorang nasionalis modern yang mendapat pengaruh kuat dari Eropa. Dalam pandangan Nehru, Gandhi "... tidak menginginkan orang mengidealkan bertambahnya kenyamanan dan kesenangan, tetapi berpikir tentang kehidupan moral, dengan pelan-pelan menghilangkan kebiasaan buruk mereka bersenang-senang, kemudian sebara individual dan spiritual memajukan diri" (Thomas, 1987. Diambil dari dari *J. Nehru, Autobiography*, Allied Publishers, Bombay, 1962). Kiranya demokrasi modern bagi Nehru adalah kemakmuran dan kesejahteraan India.

### Prinsip-prinsip dalam Demokrasi Gandhi

Pertama-tama perlu diketahui bahwa Gandhi tidak pernah menulis buku atau mengemukakan ide tentang "demokrasi" secara sistematis ataupun komprehensif. Akan tetapi, tidak bisa diingkari bahwa dia seorang demokrat atau penganut paham demokrasi. Dalam arti yang luas, ia melawan autokrasi dan kesewenangan pemerintahan, entah asing maupun pribumi. Dalam bagian ini akan dirumuskan pemikiran Gandhi tentang demokrasi dari buku Krishna Kripalani, *Mahatma Gandhi, All Men are Brothers: Autobiographical Reflections* (AMB) pada pokok "*democracy and the people*". Dalam buku tersebut terdapat 53 kutipan dari berbagai tulisan dan pernyataan Gandhi yang pernah dipublikasikan. Beberapa pernyataan kami terjemahkan agar bebas untuk pemahaman yang lebih jelas. Di dalamnya tampak karakter demokrasi yang dicita-citakannya dan dengan latar belakang kuat persiapan kemerdekaan India dari penjajahan Inggris. Dengan demikian, pandangannya pun tampak spesifik dan kontekstual. Berbagai corak dan elemen demokrasi yang dikemukakannya dapat kami rumuskan dalam empat topik berikut ini: (1) demokrasi dan individualisme, (2) demokrasi dan *ahimsā*, (3) demokrasi dan *Satyāgraha*, dan (4) demokrasi dan *svārāja*.

#### Demokrasi dan individualisme

Harus dikatakan bahwa pemahaman Gandhi mengenai "demokrasi" tak bisa dilepaskan dari konsep individualitas, mengingat demokrasi yang dia maksudkan, seperti sudah kami singgung di atas, lebih dalam arti semangat dan mental orang daripada sistem pemerintahan. Sebagai pelaku politik yang bertanggung jawab, tidak bisa diingkari bahwa peran individu sangat penting. Demokrasi adalah masalah kewenangan rakyat dalam menentukan siapa penguasa yang harus memerintah. Untuk itu, diperlukan rakyat yang sadar, dewasa, mandiri, dan mampu berpikir mengenai wewenang tersebut.

Bagi Gandhi, jikalau rakyat masih lemah dan belum mampu berpikir, maka mereka akan mudah diprovokasi dengan sentimen maupun fanatisme kelompok dan ikut-ikutan elite pilihannya tanpa dasar akal sehat. Gandhi menyadari bahaya ini dalam kaitannya dengan kenyataan Hindu sebagai mayoritas di India, berhadapan dengan agama-agama lain yang hidup di sana. Memang, individualisme bisa sedemikian di-mutlak-artikan sebagai kepentingan individu sehingga tidak peduli lagi dengan kepentingan sosial bersama sebagaimana

berkembang dalam wacana politik di Eropa pada masa itu. Akan tetapi, bukan ini yang dimaksudkan oleh Gandhi.

Individualisme, kalau istilah ini mau dipakai untuk menjelaskan posisi pemikiran Gandhi, harus diartikan sebagai pengakuan individu dalam peran moralnya. Demokrasi sebagai kegiatan politik adalah, dalam pemikiran Gandhi, kegiatan moral, sehingga pengingkaran terhadap peran individu sama saja dengan menghilangkan peran politiknya. Individu yang dipentingkan oleh Gandhi adalah yang sadar moral, tahu tanggung jawab, sebab, jika tidak, pemilu yang diselenggarakan untuk rakyat tidak akan menghasilkan demokrasi yang kokoh. Berlawanan dengan individu yang sadar moral, konsep individualisme sering dikritik karena mengutamakan hak-hak seraya mengabaikan kewajiban.

Bagi Gandhi, kewajiban justru merupakan ciri individu yang bertanggung jawab. Jikalau hak-hak dan kepentingan individu diutamakan, sementara kewajiban warga negara diabaikan, maka tidak akan ada yang memenuhi hak-hak yang mereka inginkan. "Sumber sejati dari hak-hak adalah kewajiban. Jikalau kita semua menjalankan kewajiban kita, hak-hak tidak akan sulit dipenuhi. Jikalau kita mengejar hak-hak dengan meninggalkan kewajiban kita, maka mustahil kita dapat memenuhi keinginan itu (*will-o'-the-wisp*). Semakin bernafsu mengejarnya, semakin keinginan itu kandas" (*Young India*, 8 Januari 1925, dlm. AMB: 127).

Politikus, sebagai individu moral, mengandaikan kebebasan. Gandhi membedakan dua macam kebebasan, yakni luar dan dalam. "Kebebasan luar yang akan kita peroleh, sebanding dengan kebebasan dalam yang sudah kita tumbuhkan pada waktu tertentu. Jikalau pandangan tentang kebebasan ini benar, maka energi utama harus dikonsentrasikan pada hasil pembaruan dari dalam" (*Young India*, 1 November 1928, dlm. AMB: 133). Kebebasan dari dalam adalah kebebasan yang bersifat rohani, yang lembut, menenangkan, memberikan rasa percaya diri sehingga berani bersaksi kalau perlu berhadapan dengan yang lain.

Gandhi mengutarakan pandangan paradoksal dengan menggunakan istilah "tiran", namun "tiran satu-satunya yang bisa saya terima di dunia ini adalah 'suara lembut yang menenangkan' (*still small voice*) dalam diri saya. Meskipun saya harus menghadapi kenyataan sebagai minoritas, sebagai satu-satunya, dengan rendah hati saya percaya, akan berani menghadapi situasi demikian" (*Young India*, 2 Maret 1922 dlm. ABB: 131).

Artinya, menjadi minoritas, atau bahkan sendirian pun, demi mempertahankan “kebenaran”, akan dijalaninya. Tentu saja, keberanian di sini bukan untuk menyerang, melainkan untuk bertahan dalam “kebenaran”.

Dengan hati-hati Gandhi juga menyatakan bahwa keberanian untuk berbeda pandangan dari yang lain ini hanya sejauh menyangkut hal esensial sebab kita seharusnya, dalam banyak hal, mempunyai persamaan dengan masyarakat. Gandhi tetap menerima pandangan bahwa tunduk pada mayoritas merupakan kepentingan untuk memperoleh persatuan. “Saya sering dikatakan tidak mau tunduk pada keputusan mayoritas. Saya dituduh autokratik ... Saya tidak pernah mau menerima tuduhan sebagai keras kepala atau autokratik. Justru sebaliknya, saya bangga pada kodrat kebebasan saya pada hal-hal yang tidak esensial. Saya benci autokrasi. Dengan menghargai kebebasan dan kemandirian saya, demikian saya akan menghormati secara sama kebebasan dan kemandirian orang-orang lain. Saya tak punya hasrat menggandeng satu jiwa pun, jikalau saya tak berhasil mengembalikan pada alasan mereka sendiri ... Saya mempunyai pengalaman, kalau saya mau hidup dalam masyarakat dan tetap mempertahankan kemandirian saya, maka saya harus membatasi diri dalam hal pembicaraan tentang kemandirian, yakni hanya menyangkut hal-hal pokok esensial. Dalam hal lain yang bukan bertolak dari agama dan kode moral personal, orang harus menyerah kepada mayoritas” (*Young India*, 14 Juli 1920, dlm. AMB: 131). Dalam pernyataannya ini, jelas sekali disposisi Gandhi dalam hal individu moral.

Tetapi dari lain pihak, “dalam penerapannya, pengaturan mayoritas seharusnya menyempit, artinya persetujuan dengan mayoritas untuk hal-hal yang kecil. Sebab, akan menjadi perbudakan kalau orang digiring oleh mayoritas untuk segala keputusannya. Demokrasi bukanlah negara di mana orang-orang bertindak seperti domba. Di bawah demokrasi, kebebasan berpendapat dan bertindak harus dijaga” (*Young India*, 2 Maret 1922, dlm. AMB: 133). Sebab, “dalam hal kesadaran, hukum mayoritas tidak punya tempat” (*Young India*, 4 Agustus 1920, dlm. AMB: 133). Kesadaran hukum berarti kesadaran akan hak dan kewajibannya, maka orang hanya akan kehilangan kebebasannya karena kelemahannya sendiri (*India's Case for Swaraj*, Februari 1932, dlm. AMB: 133), yakni jikalau dia tidak berani menyatakan pendapatnya yang dijamin oleh hukum.

“Bukan bedil Inggris yang bertanggung jawab atas ketundukan kita, melainkan kesediaan bekerja sama” (*Young India*, 9 Februari 1921, dlm. AMB: 133). Maksudnya, orang-orang India tidak boleh menyalahkan ancaman bedil penjajah sebagai dalih ketakutan dan kemauannya untuk bekerja sama dengan mereka. Dipandang dari luar, bedil tampaknya mengancam, akan tetapi jikalau kebebasan dalam hati nurani masih menyala, orang tidak akan takut ancaman luar dan tetap berani bertahan dalam kebenaran untuk menolak kerja sama dengan mereka. Menurut Gandhi, pemerintah yang kejam sekalipun tidak akan bisa berlanjut kecuali yang diperintah menyetujui; dan persetujuan ini sering dihasilkan dengan pemaksaan. Tetapi, begitu yang yang diperintah tidak takut, kekuatan si penguasa kejam pun lenyap (*Young India*, 30 Juni 1920, dlm. AMB: 133).

Dalam kutipan-kutipan yang tidak mudah diterjemahkan secara langsung ini, tampak bahwa pendirian Gandhi mirip dengan semangat kemerdekaan bangsa Indonesia yang menghasilkan rumusan lambang bendera “merah-putih”, berani karena benar. “Tak ada keberanian yang lebih besar daripada penolakan yang keras untuk bertekuk lutut pada penguasa dunia, betapapun besar (kekuasaan itu), dan bahwa tanpa kepahitan jiwa dan dalam kepuhan iman yang dihidupi jiwa, hal itu mustahil terjadi” (*Harjira*, 15 Oktober 1939, dlm. AMB:133). Dalam individualisme moral ini, keberanian sangat dipentingkan Gandhi. Namun, tampak dari pernyataan-pernyataannya bahwa hal ini tetap sejauh terkait dengan kebenaran. Inilah yang dikembangkan dalam gagasan tentang *ahimsa*.

### Demokrasi dan *Ahimsa*

Salah satu kelemahan demokrasi, bila tidak diatur dengan persyaratan yang adil, adalah masuknya kaum kaya (*borjuis*) dalam sistem itu, dan mereka bisa bercokol dalam kekuasaan karena modal ekonomi mereka yang kuat. Dalam hal pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, dan rahasia, serta diikuti semua pihak, kekuatan ekonomi yang sedemikian besar bisa menentukan kemenangan akhir dari kekuasaan sehingga meski secara formal proses berkesan demokratis, tetapi dalam kenyataan bisa terjadi abal-abal, tidak mencerminkan kehendak rakyat. Itulah yang terjadi pada awal demokrasi liberal dan mendapat kritik keras dari Karl Marx sehingga ia mencurigai negara dan mengharapkan kehancuran negara melalui revolusi, sebab dalam demokrasi liberal, kaum miskin tak akan pernah punya peluang untuk menang. Dalam pemerintahan Orde

Baru, demokrasi juga pernah digugat karena berkesan abal-abal dan para politisi dari partai nonpemerintah mengusulkan tambahan prinsip jujur dan adil (jurdil). Akan tetapi Karl Marx berkeras dengan revolusi karena tidak memercayai pembaruan prinsip yang dia anggap rekayasa akal untuk menguasai.

Mirip dengan Marx, dalam kacamata Gandhi, demokrasi justru harus memperhatikan yang lemah supaya mereka pun mendapatkan peluang yang sama. Akan tetapi, berlawanan dengan paham Marx, Gandhi menolak revolusi yang merupakan perebutan kekuasaan secara kasar dengan kekerasan. "Pemahaman saya tentang demokrasi ialah, bahwa atas dasar itu, yang paling lemah harus mendapatkan peluang yang sama dengan yang paling kuat. Hal ini mustahil dilakukan kecuali dengan cara tanpa kekerasan" (*Interview*, April 1940, dlm. AMB: 126). Tanpa kekerasan (*non-violence*) sering disalahartikan dengan antikekerasan, lalu berkesan seolah-olah orang bisa membalas menyerang kekerasan. Jikalau demikian, seruan itu justru sudah merupakan pembenaran untuk kekerasan yang terselubung. Kekerasan tidak akan dikalahkan atau dihilangkan dengan kekerasan lain. Lebih tepat kiranya kalau maksud Gandhi diartikan sebagai "nirkekerasan", atau "awakekerasan", yakni cara lembut dalam menjalankan demokrasi. Dalam kriteria ini, maka segala macam hoaks, penipuan, pengelabuan, pencitraan, ujaran kebencian, provokasi, apalagi fitnah, sudah terkena pasal kekerasan, sebab dengan cara-cara ini mereka memaksakan kehendak sendiri dan mengancam kebebasan yang lain, belum lagi penipuan dan pengelabuan pilihan melalui suap politik uang. Jikalau hal-hal demikian dibiarkan, maka yang lemah memang menjadi terpaksa, disadari atau tidak, mengikuti pihak yang menggunakan kekerasan psikologis yang sangat mengelabui semacam itu.

Gandhi mengakui bahwa kemampuan orang tidak sama karena dalam masyarakat dimungkinkan orang yang satu lebih maju dari yang lain, entah karena bakat ataupun kemampuannya. Maka "... menurut kodratnya, ada orang pandai yang mempunyai penghasilan yang lebih besar, tidak perlu bakat ini diingkari. Tetapi, jumlah penghasilan yang lebih besar ini mesti digunakan untuk kebaikan negara, seperti halnya penghasilan anak-anak dari bapak yang sama mesti digunakan untuk keperluan keluarga..." (*Young India*, 26 November 1931, dlm. AMB: 128). Dalam hal ini, Gandhi seperti mengingatkan fungsi sosial dari kelebihan kemampuan seseorang, baik itu berupa kekayaan maupun hal lain.

Hal ini demi pembentukan solidaritas dalam demokrasi. Perbedaan dalam kekuatan apa pun tidak akan menjadi masalah, asalkan yang kuat menyadari fungsi sosial dari kekuatan mereka. Melalui solidaritas sosial ini, yang kuat mengorbankan diri demi kebersamaan dan keutuhan masyarakat, bukannya memanfaatkan untuk menguasai mereka. "Berkorban" bukanlah istilah asing dalam konteks *ahimsa*.

Adanya perbedaan-perbedaan dalam masyarakat di dunia hingga kini adalah fakta yang tak perlu diingkari. Hal ini memperlihatkan bahwa hidup bersama bertumpu pada kebenaran, bukan pada paksaan atau kekerasan. Ada semacam kerelaan untuk saling mengalah. "Beribu-ribu orang, puluhan ribu, menggantungkan eksistensi mereka pada berlakunya daya (kebenaran) ini. Percekokan kecil dari jutaan keluarga dalam kehidupan bersama, hilang berhadapan dengan kekuatan ini. Ratusan bangsa hidup dalam damai" (*India Home Rule*, 1909, dlm. AMB: 127). Sayang sejarah hanya mencatat peperangan dan pertikaian bangsa-bangsa, sementara kehidupan bertentang sehari-hari yang penuh keikhlasan luput dari catatan sejarah. Padahal, itulah kejadian yang lebih lazim. Seperti dalam keyakinan Aristoteles, Gandhi juga berpandangan apa yang berlaku dalam keluarga, itulah yang juga berlaku dalam masyarakat, karena masyarakat dan negara merupakan organisasi dan akumulasi keluarga-keluarga.

Jadi, perbedaan-perbedaan yang bersifat gradual bisa menjadi kekuatan sosial ketika yang berlebih menyumbangkan kepada yang berkekurangan. Oleh karena perbedaan itu meliputi banyak segi, tidak hanya ekonomi, maka semua warga bisa saling menyumbang, masing-masing menurut kapasitas dan kemampuannya, sehingga kekayaan masyarakat bisa terbagi rata. Inilah yang dalam etika disebut "aturan emas" atau hukum timbal balik (resiprokal). Namun, lebih dari itu, Gandhi juga peduli dengan kepentingan suara hati. Akan tetapi, berbeda dengan modal kekayaan atau kapasitas lainnya yang bisa dibagi-ratakan, perbedaan hati nurani tidak bisa didamaikan karena bukan kuantitas yang bisa disamaratakan. Pemerataan atau penyeragaman suara hati akan berkesan memaksakan kesadaran moral kepada yang lain. Oleh karena itu, pemerataannya berupa toleransi (saling hormat) pada pandangan yang berbeda ini. "Aturan emas (*golden rule*)" dari perilaku,

1 *Golden Rule* adalah prinsip etika yang mendasarkan tindakan moral pada pengandaian timbal-balik (saling berbalasan).

oleh karena itu, adalah toleransi timbal balik, karena sadar bahwa kita tidak akan pernah berpikir secara sama dan (masing-masing) melihat kebenaran dalam serpihan saja (baca: bukan keseluruhan) dan dari sudut pandang berbeda. Kesadaran nurani bukan hal yang sama untuk semua; sebab sementara hal itu merupakan tuntunan yang baik untuk perilaku seseorang, namun akan menjadi intervensi yang tak bertanggung bagi kebebasan suara hati kalau memaksakan perilaku itu pada kehendak semua orang (*Young India*, 23 September 1926, dlm. AMB: 130).

Maka, perbedaan pandangan tidak seharusnya menjadi permusuhan. Sebab, "kalau begitu, saya dan istri saya adalah musuh satu sama lain ... Tidak ada dua pribadi di dunia yang tidak mempunyai perbedaan dalam pandangan, dan karena saya pengikut *Gita*, saya selalu mencoba memandang mereka yang berbeda dari saya dengan kasih yang sama seperti yang saya ungkapkan kepada mereka yang dekat dan terkasih (*Young India*, 26 Maret 1931, dlm. AMB: 131).

Dalam semangat *ahimsā*, perbedaan kekayaan dan kapasitas diatasi dengan saling membagikan untuk membentuk masyarakat yang solider, yang berkelebihan dalam hal ini perlu "berkorban". Sementara itu, perbedaan dalam pandangan moral dan suara hati diatasi dengan toleransi. Mengapa? Karena keyakinan dan suara hati tidak bisa "dikorbankan" demi yang lain dan tidak boleh dikalahkan. Toleransi sebagai pengakuan dan penghargaan adanya perbedaan pandangan moral dan agama merupakan keharusan. Intoleransi, menurut Gandhi, lebih buruk dari pemaksaan melalui sistem birokrasi. "Kita menjadi tiran jikalau memaksakan keinginan kita pada yang lain, lebih buruk daripada sejumlah orang Inggris yang membentuk birokrasi. Teror mereka berupa pemaksaan oleh sekelompok kecil (baca: birokrat) yang berusaha bertahan di tengah-tengah oposisi. Teror kita berupa pemaksaan oleh mayoritas, dan karenanya lebih buruk dan sungguh-sungguh tak bertujuan daripada mereka. Oleh karena itu, kita harus menghapuskan pemaksaan dalam bentuk apa pun dalam

---

Prinsip ini berbunyi: "Perlakukanlah yang lain sebagaimana kamu setuju untuk diperlakukan dengan cara yang sama, dalam situasi yang sama (*Treat others only as you consent to being treated in the same situation*). Prinsip ini, dengan rumusan yang agak bervariasi, dapat ditemukan dalam berbagai naskah kitab suci dan kitab-kitab kebijaksanaan lainnya. Keterangan yang lebih lengkap lihat "Ch. 8 The Golden Rule" dalam Harry J. Gensler, *Ethics: A Contemporary Introduction*. London-New York: Routledge, 1998: 104 dst.

perjuangan kita ..." (*Harijan*, 27 Mei 1939, dlm. AMB: 130). Penolakan Gandhi terhadap kekerasan dan pemaksaan sangat tegas. "Saya yakin bahwa demokrasi hanya dapat dihasilkan tanpa kekerasan (*non-violence*). Bangunan federasi dunia hanya dapat diangkat atas dasar tanpa kekerasan, dan kekerasan harus sama sekali menyerah untuk urusan dunia" (*Gandhi's Correspondence with the Government, 1942-44*, dlm. AMB: 128).

"Saya tidak menyalahkan Inggris. Andai kata, seperti mereka, jumlah kita hanya sedikit, kita pun mungkin akan menggunakan cara-cara yang sama seperti mereka. Menakut-nakuti dan mengelabui adalah senjata dari orang yang lemah, bukan orang yang kuat. Inggris lemah dalam hal jumlah (orang), kita lemah meskipun banyak jumlahnya (perduk). Akibatnya, masing-masing memaksa yang lain tunduk. Hal yang lazim bahwa orang Inggris kehilangan karakternya setelah menduduki India, dan orang India kehilangan keberanian dan kejantanan setelah mengenal Inggris. Proses pelemahan ini tidak baik bagi kedua bangsa, atau bagi dunia. Tetapi, jikalau kita, orang India, mau memperhatikan diri sendiri, maka orang Inggris dan bagian dunia lain pun akan memperhatikan diri mereka sendiri. Oleh karena itu, sumbangan kita kepada dunia adalah membangun rumah kita sendiri agar teratur" (*Young India*, 22 September 1920, dlm. AMB: 134). *Ahimsā*, yang secara harfiah tidak mau menggunakan kekerasan, mempunyai implikasi bahwa dalam hal ide, gagasan, dan keinginan kita pun tidak boleh kita paksakan kepada yang lain tanpa yang lain menerimanya dengan penuh kesadaran sebagai "kebenaran". Maka, *ahimsā* terkait erat dengan *satyāgraha*.

### Demokrasi dan *Satyāgraha*

"Pada saat saya menjadi *satyāgrahi*, sejak itu saya berhenti menjadi bawahan, tetapi tidak berhenti menjadi warga negara. Seorang warga negara menaati hukum dengan sukarela dan tak pernah di bawah paksaan atau karena takut pada hukuman yang ditetapkan bagi yang melanggar. Ia melanggar hukum ketika ia menganggapnya perlu dan siap sedia dengan hukuman" (*Mahatma*, vol. VI, Mei 1943, dlm. AMB: 135). Seorang penganut *Satyāgraha* tunduk pada hukum dengan kesadaran bahwa hukum itu benar, dan berani melanggar hukum ketika tahu hukum itu tidak benar. Pemimpin yang mencari popularitas dan tidak setia pada suara hatinya, dia tidak mengikuti kebenaran, ibarat perahu yang diombang-ambingkan gelombang. "Pemimpin tidak berguna jikalau ia bertindak melawan

apa yang mendesak dari kesadarannya, seperti terjadi saat dikelilingi oleh orang-orang yang mempunyai berbagai macam pendirian. Dia akan didorong seperti kapal yang tidak bersauh kalau dia tidak mempunyai suara dari dalam diri untuk dijadikan pegangan dan pedoman" (*Young India*, 23 Februari 1922, dlm. AMB: 132). Untuk itu, pemimpin harus bisa mendisiplinkan diri.

Secara agak panjang Gandhi menulis refleksinya, "... Seorang demokrat adalah seorang yang mendisiplinkan diri. Demokrasi muncul secara alami pada diri orang yang terbiasa dengan kesediaan menaati semua hukum, manusiawi ataupun ilahiah. Saya mendaku diri sebagai seorang demokrat, baik secara instingtif maupun berkat latihan. Biarlah mereka yang ambisius untuk mengabdikan demokrasi mengukur diri dengan terlebih dulu tes demokrasi yang tidak menyenangkan ini. Lebih lanjut, seorang demokrat harus sungguh-sungguh ingkar diri (*selfless*). Dia harus berpikiran dan bermimpi tidak dalam rangka kepentingan diri atau partainya, tetapi hanya demi demokrasi ... Saya menghargai kebebasan individual, tetapi kalian harus ingat bahwa manusia secara hakiki adalah makhluk sosial. Ia muncul dalam statusnya yang sekarang dengan mempelajari dan menempatkan individualisme dirinya dalam tuntutan kemajuan sosial. Individualisme yang semena-mena adalah hukum binatang di hutan. Kita telah mempelajari untuk memahami arti kebebasan individual dan pengendalian sosial. Tunduk dengan rela pada pengendalian sosial untuk kesejahteraan seluruh masyarakat, memperkaya baik individu maupun masyarakat, di mana kita menjadi anggotanya" (*Harijan*, 27 Mei 1939, dlm. AMB: 130).

Gandhi tidak sepaham dengan ajaran utilitarianisme, bukan sekadar karena yang dicari adalah keuntungan dan bagi banyak orang, melainkan karena dengan prinsip ini, ada minoritas yang terpaksa dikorbankan. Dia menilai ajaran demikian ini tidak mempunyai hati dan menyengsarakan manusia. "Ajaran yang paling nyata dan pantas untuk manusia seharusnya demi kebaikan terbesar bagi semua, dan hal ini hanya dapat dicapai sepenuhnya dengan pengorbanan diri (*self sacrifice*)" (*The Diary of Mahadev* dlm. AMB: 131). Pengorbanan tidak bisa ditimpa-paksakan pada yang lain, tetapi hanya pada diri sendiri. Dari lain pihak, dalam hal yang esensial, seperti sudah diterangkan di atas, yakni menyangkut

agama dan suara hati, orang tidak boleh menyerah pada pandangan massa. Bahkan, pemimpin pun harus bertindak berlawanan dengan pandangan massa jikalau hal itu tidak masuk dalam akalunya.

Demi memegang prinsipnya, Gandhi bersedia untuk menderita. Misalnya, kalau harus menjalankan ketidaktaatan atau pembangkangan sipil (*civil disobedience*), dengan risiko ditahan, dipukul, bahkan dipenjara. Prinsip nonkekerasannya menyebabkan ia menolak segala bentuk kekerasan dalam perlawanan fisik, meski dikenai kekerasan.

Itulah pengorbanan yang harus ditanggungnya sebagai risiko. "Ketidaktaatan sipil (*civil disobedience*) adalah pemberontakan tanpa unsur kekerasan; perlawanan sipil sepenuhnya yang menafikan otoritas negara. Dia berada di luar hukum (*oulaw*), menyatakan tak peduli dengan setiap hukum negara tak bermoral. Maka, misalnya, ia menolak membayar pajak, menolak untuk mengakui otoritas dalam pergaulan sehari-hari, bisa jadi menolak menaati hukum pelanggaran dan kewajiban militer ... Dalam melakukan semua ini, ia tak pernah menggunakan kekerasan dan tak pernah melawan dengan kekerasan, sekalipun hal itu digunakan untuk melawannya. Bahkan, ia membiarkan diri dipenjara dan berbagai kekerasan dikenakan terhadapnya. Semua ini ia jalani karena dan ketika dia menemukan bahwa kebebasan fisik, yang tampaknya ia nikmati, menjadi beban yang tak tertanggungkan. Dia beralasan bahwa negara hanya membiarkan kebebasan pribadi sejauh warga negara tunduk pada pengaturan negara. Ketundukan pada hukum negara merupakan harga yang harus dibayar warga untuk kebebasan pribadi itu. Oleh karena itu, ketundukan pada negara yang seluruhnya, atau sebagian besar, amoral merupakan pertukaran kebebasan yang tidak bermoral pula ... Jikalau demikian, pembangkangan sipil merupakan ekspresi yang paling berdaya dari keresahan jiwa, dan protes yang terang melawan kelangsungan negara yang jahat ..." (*Young India*, 10 November 1921, dlm. AMB: 135-36).

Pengorbanan dalam melawan pemerintah atau negara tentu saja dimaksudkan dalam perlawanan pada negara yang betul-betul jahat dan tidak bermoral. Gandhi tidak memberi spesifikasi mengenai sifat amoral negara, tetapi yang dimaksud kiranya pertama-tama adalah penjajah Inggris yang tidak sah menguasai India.

Meskipun demikian, ia tidak serta-merta membiarkan rakyat India melawan dengan senjata, melainkan dengan moral yang kuat, disiplin terhadap diri sendiri, dan sedia berkorban. "Disiplin bukan saja mempunyai tempat dalam strategi nonkekerasan, tetapi, lebih dari itu, juga dituntut. Dalam pasukan *Satyāgraha*, setiap orang adalah tentara dan pelayan. Tetapi, pada puncaknya, setiap tentara *Satyāgrahi* juga harus menjadi jenderal dan pemimpin bagi diri sendiri. Sekadar disiplin tidak dapat membentuk kepemimpinan seseorang. Untuk itu diperlukan iman dan visi" (*Harijan*, 28 Juli 1940, dlm. AMB: 136). "Keyakinan saya teguh. Jikalau setiap *satyāgrahi* bertahan setia sampai akhir, maka kemenangan sudahlah pasti" (*Sbarmati*, 1928, dlm. AMB: 137). Bertahan dalam kebenaran, setia dan tidak mengubah keyakinan meski menghadapi kesulitan, itulah *Satyāgraha*. Itulah harga diri. "Pekerjaan saya akan berakhir kalau saya berhasil menyampaikan keyakinan pada keluarga manusia, bahwa setiap pria dan wanita, betapapun lemah secara fisik, adalah penjaga untuk harga diri dan kebebasannya sendiri. Pertahanan ini berhasil meski seluruh dunia mungkin menentang perlawanan individual ini" (*Mahatma*, vol. VI., 9 Agustus 1944, dlm. AMB: 137).

Konsekuensi dari keteguhan sikap dalam kebenaran adalah tidak mau bekerja sama (nonkooperasi) dengan penguasa dan penjajah bangsa. "Apa arti nonkooperasi dalam kaitannya dengan penderitaan? Kita rela untuk kehilangan bantuan dari pemerintah dan ikhlas untuk menerima ketidaknyamanan sebagai akibatnya karena yang memerintah (kita) berlawanan dengan kehendak kita. 'Di bawah pemerintahan yang tidak adil, memiliki kekuasaan dan kekayaan adalah kejahatan. Sedang kekurangan dan kemiskinan dalam hal ini (justru) menjadi keutamaan,' kata Thoreau. Tetapi dalam negara yang sedang berkembang, bisa terjadi kesalahan ini, yakni serta-merta mau menghindari penderitaan, lalu menerima apa saja, asal menguntungkan ..." Hal demikian menurut Gandhi tidak bisa dilakukan; alasan takut pada diri sendiri atau (karena) sekolah peduli pada rakyat yang menderita, lantas mau berpartisipasi dengan pemerintah penjajah (*Young India*, 16 Juni 1920, dlm. AMB: 135). Banyak warga negara mau bekerja sama dengan pemerintah penjajah karena memberi keuntungan dirinya, akan tetapi dalam ukuran makro hal ini harus dibayar oleh warga negara yang lainnya.

### Demokrasi dan *Svarāj* (pemerintahan mandiri)

Gandhi kadang menyamakan demokrasi dengan *Svarāj* (pemerintahan mandiri). Manakala India dibebaskan dari kekuasaan Inggris, maka rakyat sendiri yang akan menentukan kebijakan pemerintahan. Akan tetapi "kemerdekaan bukanlah sekadar penarikan dari (kekuasaan) Inggris; melainkan kesadaran diri sebagai penentu nasibnya sendiri, dia sendiri (warga) menjadi legislator melalui perwakilan yang dipilihnya" (*Young India*, 13 Februari 1930, dlm. AMB: 128). Namun, Gandhi memperingatkan bahwa pemerintahan mandiri, oleh rakyat sendiri, tidak bisa diambil alih secara sewenang-wenang atau dengan kekerasan, sesuai dengan prinsip *ahimsā*, karena implikasinya nanti pemerintah yang terbentuk pun lantas akan ikut-ikutan melegalkan kekerasan, misalnya untuk menangkalk berbagai macam perbedaan pendapat dan oposisi (*Harijan*, 27 Mei 1939, dlm. AMB:126). Jadi, tampaknya sama saja apakah pemerintah dijalankan oleh orang asing atau bangsa sendiri jikalau pada akhirnya pemerintah menggunakan kekerasan untuk memaksa orang mempunyai pandangan yang sama.

Pemerintahan mandiri "... tergantung seluruhnya pada kekuatan internal kita sendiri," kata Gandhi (*India Home Rule*, 1909, dlm. AMB:127). Gandhi menekankan pentingnya kekuatan internal dalam arti memperjuangkan terus-menerus dan mempertahankannya.<sup>2</sup> Ibarat orang yang menanggung beban, dia harus tetap panggah bertahan meski merasa kelelahan. Semangat kemandirian untuk tidak lengah ini penting karena sesudah pemerintahan dapat diambil alih oleh bangsa sendiri, orang biasanya lantas seandainya. Tanpa usaha yang panggah dalam bertahan dengan semangat kemerdekaan ini, pemerintahan oleh bangsa sendiri pun tidak layak disebut kemandirian. Artinya, kemerdekaan itu merupakan mandat untuk mengisi negara dengan sesuatu prestasi.

Merdeka tidak cukup diartikan sebagai "bebas dari", melainkan harus dilanjutkan dengan "bebas untuk" bekerja, mengisi kemerdekaan. Lebih lanjut, "Saya berusaha memperlihatkan, baik dalam kata maupun tindakan, bahwa politik pemerintahan sendiri

<sup>2</sup> Kita diingatkan pada seruan Bung Karno di awal kemerdekaan, dengan istilah "revolusi belum selesai". Terasa di sini semangat Gandhi yang berbicara untuk tetap teguh berjuang. Bagi Sukarno, "kemerdekaan" barulah medium, yakni "jembatan emas", menuju Indonesia. Orang yang hanya puas dengan "kemerdekaan" dalam arti politik tidak bisa diharapkan untuk cita-cita itu.

(kemerdekaan), yakni pemerintahan untuk sejumlah besar orang, tidak lebih baik daripada pemerintahan mandiri secara individual" (*India Home Rule*, 1909, dlm. AMB: 127). Artinya, kemandirian individual sebagai warga negara, bagi Gandhi, tetap merupakan modal dasar dari kemerdekaan dan demokrasi negara dan pemerintah.

Namun, kemandirian dalam diri warga negara tidak terjadi dengan sendirinya, India perlu mendidik putra-putrinya agar masyarakat tidak menjadi massa atau kumpulan orang yang ikut-ikutan dalam politik, melainkan mempunyai kesadaran yang kuat. Ini yang akan menjadi dasar untuk pemerintahan sendiri yang mandiri. "Saya berharap bisa memperlihatkan bahwa *Svarāj* yang sejati tidak diperoleh melalui penerimaan otoritas oleh sejumlah orang (elite), melainkan pengakuan kapasitas mereka oleh seluruh masyarakat dan penolakan otoritas yang disalahgunakan. Dengan kata lain, *Svarāj* diperoleh lewat pendidikan massa ke arah penyadaran kemampuan untuk mengatur dan mengontrol otoritas" (*Young India*, 29 Januari 1925, dlm. AMB: 128). *Svarāj* bukan sekadar pengambilalihan otoritas kepada sejumlah elite, melainkan penyadaran semua warga negara terhadap penggunaan kekuasaan yang keliru; jadi *Svarāj* mengandaikan kemampuan warga negara untuk mengontrol pelaksanaan otoritas yang benar.

Lebih lanjut dikatakan bahwa kekuatan itu tidak terletak pada berkumpulnya para legislator, para elite, melainkan kepercayaan yang diberikan rakyat kepada mereka. Jadi, rupanya Gandhi bermaksud agar peralihan kekuasaan itu bukan hanya urusan elite dengan elite. "Sesungguhnya, kekuatan itu ada pada rakyat dan dipercayakan sementara pada mereka yang dipilih sebagai wakil-wakil. Parlemen tidak mempunyai kekuatan atau eksistensi yang lepas dari rakyat. Selama dua puluh satu tahun saya telah mengusahakan untuk meyakinkan masyarakat mengenai kebenaran ini ..." ("*Constructive Programme*", Desember 1941, dlm. AMB: 129). Pemerintahan demokrasi dengan demikian bukan sekadar sudah adanya wakil-wakil rakyat yang menerima pemerintahan, melainkan bahwa keberadaan mereka memang pilihan dan dipercaya oleh rakyat. Maka, perwakilan yang diperoleh tidak melalui proses demokrasi yang benar adalah penipuan, bukan demokrasi.

Pemerintah yang memegang kendali tidak boleh sembarangan, karena ini artinya memainkan kuasa rakyat. Dengan nuansa moral, Gandhi mengingatkan pemerintahan mandiri, harus sungguh-sungguh

pemerintahan kerakyatan yang jujur, murni, dan bukan asal berkuasa. "Saya tidak tertarik pada pembebasan India hanya karena lepas dari kuk Inggris. Saya cenderung pada pembebasan India dari kuk apa pun juga. Saya tak berhasrat untuk (adanya) perubahan pemerintahan yang sekadarnya (*king log for king stork*). Jadi, bagiku, gerakan *Svarāj* adalah gerakan pemurnian diri" (*Young India*, 12 Juni 1924, dlm. AMB: 129). "Bagiku, pelatihan dalam *Svarāj* yang kita butuhkan adalah kemampuan membela diri melawan seluruh dunia dan untuk menghayati kehidupan kita sendiri dalam kebebasan sempurna, meski masih ada kekurangannya. Pemerintahan yang baik bukanlah pengganti untuk pemerintahan mandiri" (*Young India*, 22 September 1920, dlm. AMB: 134). Sekali lagi *Svarāj* diartikan Gandhi bukan bentuk pemerintahannya yang sudah dipegang oleh penguasa pribumi, melainkan semangat pemerintahannya yang bisa dipercaya dan diandalkan karena memang dipilih oleh rakyat. Kerangka-dalam yang tidak kelihatan inilah yang lebih menentukan kemandirian pemerintahan daripada sistem birokrasi atau apa pun yang formal dan tampak dari luar.

Maka, pemerintahan mandiri yang demokratis pun bisa mendum; "Demokrasi yang disiplin dan tercerahkan adalah hal yang paling indah di dunia. Demokrasi yang penuh prasangka, ketidakpedulian, dan takhayul, akan berakhir dengan sendirinya pada kekacauan dan mungkin perusakan diri" (*Young India*, 30 Juli 1931, dlm. AMB: 134); Gandhi curiga jikalau "demokrasi dan kekerasan dapat berjalan bersama. Negara-negara yang kini disebut demokratis telah menjadi sama sekali totalitarian atau, jikalau mau, menjadi betul-betul demokratis, mereka seharusnya berani untuk tidak melakukan kekerasan. Sungguh menghujat kalau mengatakan bahwa tanpa kekerasan hanya bisa dipraktikkan dalam taraf individu-individu dan tidak oleh negara-negara yang terdiri dari individu" (*Harijan*, 12 November 1938, dlm. AMB: 134). Sekali lagi, Gandhi mengingatkan di sini bahwa *Svarāj*, pengaturan negara, berkaitan erat juga dengan *ahimsā*.

Itulah peringatan Gandhi terhadap pemerintahan yang mendaku kekuasaan negara, sebab negara adalah "mesin tak berjiwa" di mana sikap kerasnya tidak bisa dilunakkan. Negara memperlihatkan kekerasan dalam bentuk yang terkonsentrasi dan terorganisasi. "Saya memandang perkembangan kekuasaan negara dengan kekhawatiran yang besar karena meski tampaknya melakukan yang baik dengan mengurangi eksploitasi, negara sangat merugikan manusia karena merusakkan

individualitas yang merupakan akar dari segala macam perkembangan. Kita banyak tahu tentang kasus di mana manusia bisa dipercaya, tetapi hal ini tidak berlaku untuk negara yang sungguh-sungguh hidup untuk orang miskin" (*Mahatma*, vol. IV, 1934, dlm. AMB: 132). Bagi Gandhi, eksistensi negara merupakan dilema. Di satu pihak diperlukan pengaturan hidup bersama dalam masyarakat, tetapi di lain pihak negara tidak bisa diandalkan karena akan menggunakan kekuasaannya untuk mengatur dan menyeragamkan. Idealnya, masyarakat bisa mengatur diri sendiri, tidak dipaksa oleh negara, dan negara menjamin kebebasan masyarakat. Akan tetapi, mampukah masyarakat mengontrol dirinya sendiri? Apakah masyarakat warga (*civil society*) mampu saling memercayai satu sama lain sehingga negara tidak perlu campur tangan dalam mengatur hubungan antarwarga?

"Pemerintahan mandiri berarti upaya (rakyat) terus-menerus menjadi tak tergantung (*independent*) pada kontrol pemerintah, entah itu pemerintah asing atau nasional. Pemerintah dalam *Swaraj* hanya jadi hal yang disayangkan bila orang-orang lantas mengharapkan (menggantungkan) padanya pengaturan hidup harian secara mendetail" (*Young India*, 6 Agustus 1922, dlm AMB: 132). "Lebih baik mati jikalau kita tidak hidup sebagai orang-orang bebas," kata Gandhi melanjutkan. Memang, kebanyakan warga negara lebih sering dan lebih suka menggantungkan diri pada pengaturan negara daripada mengatur dirinya sendiri, tetapi ketika pengaturan menjadi semakin ketat atau detail, mereka mengeluh. Sungguh tidak sederhana demokrasi yang dimaksudkan oleh Mahatma Gandhi.

### Menarik benang merah

Perjuangan Mahatma Gandhi bukanlah perjuangan politik dalam arti biasa, apalagi dalam arti militer yang meski "merasa" benar lantas merebut kekuasaan dengan kekerasan fisik dan senjata. Tampak sekali dari pernyataan-pernyataannya bahwa kekerasan sama sekali tidak ada tempat dalam perjuangan politiknya, malah yang secara mencolok selalu dikemukakan adalah perjuangan moral, kesadaran hati nurani, keyakinan dan keteguhan pada pendirian, sedemikian rupa sehingga orang tidak takut pada risiko apa pun, termasuk kalau dikenai kekerasan dan dilukai. Inilah yang dimaksudkan pengorbanan, yakni harga yang harus dibayar untuk memiliki "harga diri dan keutamaan". Inilah yang dia rumuskan dalam semboyan *Satyāgraha*, yang arti harfiahnya berarti "tetap teguh dalam kebenaran", bisa

juga diartikan sebagai "berani karena benar". Betapa dekat semboyan ini dengan lambang bendera "merah-putih" Indonesia yang lahir dari perjuangan yang menuntut pengorbanan darah.

Namun, pendirian Gandhi yang keras terhadap *Satyāgraha* bisa disalahartikan oleh mereka yang tidak paham, seolah-olah berdasarkan keyakinan yang kuat, siapa pun atau apa pun yang berlawanan dengan keyakinannya perlu dilawan. Memang istilah "perlawanan" mudah diasosiasikan dengan "kekerasan". Dalam hal ini perlu diperhatikan dua hal: (1) menyangkut keyakinan Gandhi akan kebenaran, dan (2) menyangkut perjuangannya yang tidak mengenal kekerasan (*non-violence*). Kedua hal ini tercakup secara kait-mengait dalam semboyan-semboyan yang dikenalkannya: *ahimsa*, *satyāgraha*, dan nonkooperasi.

Menyangkut keyakinannya akan kebenaran, tidak bisa disangkal bahwa Gandhi, sebagai seorang pemeluk Hindu yang taat, pasti mengaitkan hal ini dengan agamanya. Akan tetapi, meskipun Gandhi menyebutkan agama sebagai keyakinan yang penting dan mendasar, pemahamannya tidak menyempit dengan membandingkan kebenaran agama yang satu dengan yang lain, atau mengecualikan satu dari yang lain, sebaliknya justru terbuka dan mencoba mencari kesamaan dalam usaha kebajikannya. Ia seorang religius *par excellence*. Meski memeluk Hindu, religiositas yang dianutnya keluar dari agama konvensional. Ia mau dan banyak belajar juga dari agama-agama dan kepercayaan yang lain. Hal ini tidak berarti ia jatuh dalam relativisme, sebab, seperti dikatakannya, ia tetap seorang yang fanatik, yang keras dalam keyakinannya, dan berharap setiap orang juga demikian, sehingga tetap pānggah untuk membela kebenarannya sendiri, kalau perlu dengan mengorbankan diri. Jadi, meski ada ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh tradisi agama yang dipeluknya, Gandhi tetap terbuka dengan pembaruan-pembaruan yang masuk akal, misalnya pandangannya menyangkut kasta. Persis inilah yang dimaksudkan dengan *Satyāgraha*.

Menyangkut perjuangannya, yang menolak penggunaan kekerasan, boleh dikata Gandhi mengajarkan perlawanan yang lembut. Ini tidak berarti lembek semangatnya, karena kelembutan ini menyangkut cara penyampaian dan bukan prinsip yang dipegang. Seperti sudah diterangkan di atas, secara prinsip Gandhi seorang yang keras dan fanatik, bahkan menyebut dirinya tiran dalam perkara ini, suatu istilah yang menimbulkan asosiasi negatif meski yang dimaksudkan adalah ke-

“

Kepentingan Gandhi bukan pertama-tama kontestasi formal, melainkan jiwa atau roh kedalaman yang menggerakkan kekuasaan diri, masyarakat, dan negara. Atau lebih tepat dikatakan bahwa kontestasi, sebagai manifestasi luar dari demokrasi, harus didasari oleh semangat kerohanian yang mendalam, disiplin diri, kejujuran, dan kepercayaan dalam relasi.

ras terhadap diri sendiri. Maka istilah *non-violence* perlu dijelaskan untuk menangkal salah paham yang bisa terjadi karena istilah ini sering diterjemahkan sebagai “antikekerasan”. Terjemahan ini kiranya perlu diluruskan karena kurang mencerminkan maksud Gandhi. Pertama-tama, Gandhi tidak menekankan sikap “perlawanan” (*anti*) terhadap kekerasan, melainkan sikap boikot atau “nonkooperasi” (*non-cooperation*), yakni tidak bersedia menaati atau mematuhi perintah, aturan, hukum, atau apa pun yang berlawanan dengan “kebenaran” moral dan hati nurani.

Jadi, objek yang dilawan bukanlah pertama-tama “kekerasan”-nya, melainkan kejahatan moral yang berlawanan dengan “kebenaran”. Perlawanan terhadap “kekerasan”, apalagi dengan “kekerasan” lain, berarti menerapkan hukum “balas dendam” yang tidak akan ada habisnya. Istilah *non-violence* lebih tepat diterjemahkan dengan kata “nirkekerasan” atau “tanpa kekerasan”, sehingga nuansa perlawanan tetap ada, tetapi bukan dengan kekerasan, melainkan dengan kehendak kuat untuk setia menjalankan “kebenaran”, kalau perlu dengan menolak perintah, hukum, atau pengaturan penjahat, dan menanggung konsekuensinya dengan “pengorbanan”.

Inilah pandangan politik Gandhi yang kontroversial sehingga banyak ditentang oleh teman-temannya karena sulit sekali untuk dijalankan. Mudah dipahami bahwa orang-orang India gagal menjalankan politik ini; masyarakat dengan mudah tersulut oleh kemarahan dan ikut-ikutan merusak dalam perlawanannya. Gandhi memahaminya, tetapi tidak mau menyerah. Ia lebih terdorong melakukan puasa 72 jam sebagai silih atas kekerasan yang terjadi dan mengakui bahwa *satyagraha* mengandalkan latihan kedisiplinan diri lebih dahulu (Sudiarta, 2018: 142). Jadi, apakah dengan prinsip dan pandangannya ini Gandhi dapat menang? Teman-temannya meragukan, dan beranggapan bahwa dengan cara itu perjuangan mereka malah hancur. Tentu saja, bagi Gandhi, kemenangan tetap akan diperoleh, tetapi tidak dalam arti politik biasa, melainkan lebih dalam dari itu: kemenangan moral religius.

Menimbang pemikiran Gandhi yang demikian ini, jelas sekali Gandhi berbeda, bahkan berlawanan, dengan usaha-usaha yang ingin memperjuangkan keyakinan akan kebenaran melalui jalan kekerasan seperti dilakukan para teroris. Jikalau Gandhi bisa disebut “fanatik” dalam hal pendiriannya yang keras, tak kenal kompromi, maka maksud itu hanya bisa dipahami

menyangkut "kehendak" dalam perlawanan moralnya terhadap penjajah, dan bukan dengan penyerangan fisik, melainkan dengan bertahan dalam "kebenaran"-nya. Sebab, bagi Gandhi, penggunaan "kekerasan" sendiri seolah-olah mendiskualifikasi atau menafikan kebenaran itu sendiri karena bertolak belakang. Keyakinan akan kebenaran, menurut Gandhi, konsisten dengan suasana internal, kedisiplinan rohani yang bukan kesalahan luar. Keyakinan akan kebenaran tidak diukur dari perlawanan yang keras, apalagi dengan pengerahan massa yang cenderung menjadi mobokrasi (politik yang menggerakkan massa tidak atas dasar kebenaran moral, melainkan emosi liar, sering tanpa moral sama sekali), melainkan dengan keberanian berkorban karena kebenaran yang sesuai dengan suara hati.

Oleh karena itu, dalam pemikiran Gandhi, kepentingan demokrasi pertama-tama bukan sistem pemerintahan dalam bentuk tata kelola birokrasi dan hukum yang teratur, melainkan semangat kemerdekaan dan kemandirian warga negaranya, kesadaran mereka akan tanggung jawab dan kecintaan mereka pada negara yang benar untuk menjalankan pemerintahan sendiri (*Svarāj*). Kepentingan Gandhi bukan pertama-tama kontestasi formal, melainkan jiwa atau roh kedalaman yang menggerakkan kekuasaan diri, masyarakat, dan negara. Atau lebih tepat dikatakan bahwa kontestasi, sebagai manifestasi luar dari demokrasi, harus didasari oleh semangat kerohanian yang mendalam, disiplin diri, kejujuran, dan kepercayaan dalam relasi.

Semuanya ini tidak cukup diwacanakan dengan akal sehat, melainkan berkat kehendak yang kuat dan teguh dari kerohanian *satyāgraha* dan *ahimsā* dari jiwa ketimuran. Dalam hal ini, Gandhi bukan hanya menerima perkembangan akal model Barat, tetapi juga tetap setia pada keyakinan Hindunya bahwa dunia, bahkan segala sesuatu, itu Satu-Menyatu dalam Tuhan, sehingga tidak selayaknya merendahkan atau menyerang dan menghancurkan satu sama lain. Sebab, semua orang adalah saudara.<sup>3</sup>

Satu hal lain yang menarik untuk dikemukakan untuk menutup tulisan ini adalah kedekatan pandangan Gandhi dengan Sukarno dalam hal keserasian antara

agama dan negara dalam sistem demokrasi. Tentu saja kesan ini masih memerlukan elaborasi lebih jauh karena perbedaan India dan Indonesia menyangkut berbagai hal lain yang tidak tercakup dalam riset pendek ini. Namun demikian, tampaknya kita dapat mengatakan bahwa pandangan politik dan nasionalisme Gandhi menengahi pandangan Nehru (1889-1964) yang mengikuti pemikiran demokrasi Barat dan Shri Aurobindo (1872-1950) yang bertolak dari keyakinan Hindu ortodoks. Sementara Gandhi tidak berhasil dalam politik praktisnya karena terjadinya perpecahan India dan Pakistan—meski harus dikatakan bukan karena kesalahan di pihaknya, seperti tuduhan oleh pembunuhnya—Sukarno berhasil menelurkan pemikiran Pancasila yang mengharmonisasikan agama dan negara secara serasi. Jikalau kita perhatikan, tampak bahwa meski Gandhi seorang pemeluk Hindu yang keras, namun sangat terbuka dengan ajaran agama lain. Sukarno sendiri mengakui bahwa ia dipengaruhi Gandhi, khususnya terkait dengan gagasan yang termuat dalam Pancasila yang mengembangkan nuansa religius terbuka. Oleh karena itu, tidak mengherankan kalau Bung Karno juga mengutip Gandhi dalam pidatonya yang dikenal sebagai "Lahirnya Pancasila". Sebab Gandhi pernah mengatakan, "Saya seorang nasionalis, tetapi kebangsaan saya adalah perikemanusiaan, *My nationalism is humanity*" (Tan Swie Ling, 2014: 55). Bung Karno mengutip Gandhi untuk menjelaskan paham kebangsaannya yang terbuka, sejajar juga dengan paham ketuhanannya yang juga terbuka.<sup>4</sup> Dari pernyataan ini tampak bahwa kecintaan pada negara dan kebangsaan tidak dipertentangkan, atau bahkan bersesuaian, dengan "kemanusiaan" yang dalam Pancasila dirumuskan dalam sila kedua, "Kemanusiaan yang adil dan beradab" dan sila ketiga, "Persatuan Indonesia".

Meskipun kemerdekaan India merupakan hasil utama Gandhi dan teman-temannya dalam perjuangan politik mereka, Gandhi lebih melihat dirinya sebagai pembaharu moral kerohanian, keagamaan, dan kemanusiaan. Ia seorang "guru" yang yakin akan kebenaran

3 *All Men are Brothers* judul buku yang disunting Krishna Kripalani, mencerminkan kesatuan umat manusia, meski jika dipandang dari perkembangan pemikiran sekarang, judul itu masih memperlihatkan bias gender. Harus diakui, Gandhi belum berpikir sejauh ini.

4 Dalam pandangan Prof. Dr. A. Sunarko, pandangan Bung Karno yang demikian ini memperlihatkan keunggulan sikap inklusif, mendahului sikap Gereja Katolik yang baru menetapkan sikap keterbukaan dan inklusivitasnya secara formal dalam Konsili Vatikan II pada tahun 1965 (lihat "Agama di Zaman Post-Sekular: Tersingkir atau Mendominasi Politik?" Pidato Pengukuhan Dr. Adrianus Sunarko di STF Driyarkara, 11 Mei 2019).

agama, berlawanan dengan penganut ateisme atau mereka yang menolak agama. Keyakinan akan kebenaran agama ini bagi Gandhi tidak menafikan kemungkinannya pembaruan dalam setiap agama dan kepercayaan. Apabila agama mempunyai keterbukaan dalam mendasari kehidupan demokrasi, maka nasionalisme sesuatu bangsa tidak akan menjadi eksklusif dan chauvinistik, melainkan terbuka juga pada persoalan kemanusiaan yang luas.

Dengan demikian, sumbangan pemikiran Gandhi tidak hanya berlaku bagi perkembangan awal demokrasi India, melainkan bagi seluruh dunia. Khususnya juga pada saat sekarang, ketika negara-negara mengalami krisis demokrasi modern, ketika masyarakat tidak peduli pada otoritas pemerintahan dan pemerintah semakin tak mampu menangani berbagai persoalan

kompleks dari rakyat dan warga negara, ketika warga negara semakin mementingkan individualisme sempit atau komunalisme kelompok, ketika wacana politik tidak jalan karena kehilangan saling hormat dan kepercayaan, ketika media dikuasai oleh hoaks dan ujaran kebencian untuk memenangkan popularitas, dan seterusnya, maka pemikiran Mahatma Gandhi mengenai dasar-dasar moral dan kerohanian yang diperlukan untuk demokrasi, dan terutama semangat untuk menjalankannya, tampak tetap aktual, bahkan perlu dihidupkan kembali. Barangkali hanya dengan demikian negara-negara dan dunia kita—di tengah wacana pesimis akan berakhirnya negara-negara modern—masih bisa dikendalikan untuk kelanjutan pada masa mendatang. ●

**A. Sudiarja,**

Guru besar filsafat di STF Driyarkara, Jakarta.

## Rujukan

- Bose, Nirmal Kumar. *Selections from Gandhi*. Ahmedabad: Navajivan Publishing House. 1972 (1948).
- Fernandes, Angelo. *The Christian Way Today*. Gujarat: Gujarat Sahitya Prakash. 1988
- Gandhi, M.K. *The Story of My Experiments with Truth*. (diterjemahkan dari bahasa asli Gurajati oleh Mahadev Desai). Ahmedabad: Navajivan Publishing House. 1972 (1927).
- Gensler, Harry J. *Ethics: A Contemporary Introduction*. London–New York: Routledge. 1998
- Jones, Constance A. and Ryan, James D. (ed.), *Encyclopedia of Hinduism*. New York: Facts on File. 2007.
- Klostermaier, Klaus K. *Hinduism: A Beginner's Guide*. Oxford: Oneworld. 2007.
- Krishna Kripalani (comp. & ed.), *Mahatma Gandhi, All Men are Brothers: Autobiographical Reflections*. New York: Continuum. 1988. (disingkat AMB dlm. catatan perut).
- Sharma, S.R. (ed.). *Gandhi: Ahimsā and Non Violence in Practice*. New Delhi: Cosmo Publication. 2001.
- Strohmeier, John (diterjemahkan dari bahasa Gujarati, dengan catatan editor). *The Bhagavad Gita According to Gandhi*. Berkeley, California: North Atlantic Books. 2009.
- Sudiarja, A. *Membaca Bhagavad-Gita bersama Prof. R. C. Zaehner*. Yogyakarta: Penerbit Universitas Sanata Dharma. 2012.
- Sudiarja, A. *Bayang-bayang Kebijaksanaan dan Kemanusiaan*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2018.
- Sunarko, Adrianus. "Agama di Zaman Post-Sekulari: Tersingkir atau Mendominasi Politik?". Pidato penguikuan. STF Driyarkara. 2019.
- Tan Swie Ling, *Masa Gelap Pancasila: Wajah Nasionalisme Indonesia*. Jakarta: Ruas, 2014.
- Thomas, P.M. *20th Century Indian Interpretations of Bhagavadgītā: Tilak, Gandhi & Aurobindo*. Bangalore: The Christian Institute for the Study of Religion and Society. 1987. (disingkat IBh-TGA dalam rujukan).
- Yust, Walter (ed.in chief), *Encyclopaedia Britannica, vol.12. A New Survey of Universal Knowledge*. Chicago-London-Toronto: Encyclopaedia Britannica Ltd. 1955.